

TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) AWAL KARYA DESA MANUBA KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

Nur Humaerah

Email: nhumaerah13@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare,Sulawesi Selatan
Kode Pos 91112

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Manuba telah Transparan kepada masyarakat sesuai dengan Perspektif *Good Corporate Governance*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) responden yang terlibat yaitu Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, Kepala Desa, Kepala Dusun Alakkang, Pallae, Barantang dan Manuba. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif lapangan. Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awal Karya Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif *Good Corporate Governance*, telah menerapkan transparansi kepada masyarakat, tetapi masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang BUMDes Awal Karya Desa Manuba, pengelolaan keuangannya juga masih sebatas pencatatan. Penyampaian serta perluasan informasi hanya disebarkan melalui lisan pada saat musyawarah desa, sehingga belum memenuhi unsur keterbukaan atau tranparansi itu sendiri.

Kata Kunci : Transparansi, Good Corporate Governance, Pengelolaan Keuangan BUMDes

Abstract

This study aims to determine whether the financial management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Manuba Village is transparent according to the Good Corporate Governance Perspective. The data collection techniques used in this study are interviews and documentation. The sample in this study was 7 respondents who were involved, namely the Director of BUMDes, Treasurer of BUMDes, Village Head, Head of Alakang Hamlet, Pallae, Barantang and Manuba. Data analysis techniques in this study used field qualitative analysis. The application of the principle of transparency in the financial management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) Awal Karya, Manuba Village, Mallusetasi District, Barru Regency, viewed from a Good Corporate Governance Perspective, has implemented transparency to the community, but it has not been implemented optimally. This is because there is no access that makes it easy for the public to obtain information about BUMDes Awal Karya Desa Manuba, financial management is still limited to recording and conveying and expanding information only to be disseminated orally at village meetings, so it does not yet fulfill the element of openness or transparency itself.

Keywords : Transparency, Good Corporate Governance, Financial Management BUMDes

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu indikatornya adalah tingginya tingkat korupsi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini menuntut adanya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mendorong terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Sejalan dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek strategis yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan (15). Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara bukan hanya sebagai prinsip moral, tetapi juga merupakan kewajiban

konstitusional untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan amanah dalam mengelola anggaran publik sesuai peraturan yang berlaku (1).

Transparansi keuangan dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam hal ini, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) memainkan peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (2).

Namun, keberhasilan penerapan sistem akuntansi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor keperilakuan organisasi, seperti pelatihan, kejelasan tujuan organisasi, dan dukungan atasan. Menurut Bodnar dan Hopwood (3), kegagalan sistem informasi akuntansi umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap perilaku pengguna, bukan semata-mata karena lemahnya sistem secara teknis.

Penelitian terdahulu mendukung pentingnya pendekatan perilaku dalam implementasi sistem akuntansi keuangan. Misalnya, penelitian sebelumnya (4) menemukan bahwa dukungan atasan dan kejelasan tujuan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas SAKD. Penelitian lain (5) menunjukkan bahwa pelatihan yang memadai bagi aparat pengelola keuangan daerah berdampak langsung pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Dalam konteks ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Parepare sebagai lembaga strategis perumus kebijakan dan pengelola keuangan daerah juga dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Namun, BAPPEDA Kota Parepare masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia (SDM), khususnya pada pegawai berlatar belakang non-akuntansi yang menyebabkan lemahnya pemahaman terhadap logika sistem akuntansi akrual berbasis *double-entry*.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor keperilakuan organisasi, yaitu pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada BAPPEDA Kota Parepare. Penelitian ini juga bertujuan mengisi kesenjangan literatur yang belum banyak membahas hubungan antara faktor organisasi dan efektivitas SAKD dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, kondisi saat ini, serta interaksi sosial yang terjadi pada individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu secara langsung di lapangan (6). Penelitian ini dilakukan di lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) peneliti, yaitu di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Waktu pelaksanaan penelitian mencakup beberapa tahapan, yakni mulai dari proses wawancara dengan informan, pengumpulan data dokumentasi, hingga penyusunan rancangan dan analisis hasil penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti. Informan tersebut antara lain: Kepala Desa Manuba, Direktur BUMDes, Bendahara BUMDes, serta seluruh Kepala Dusun di Desa Manuba.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari para informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan dokumen atau arsip yang relevan dengan aktivitas BUMDes dan pemerintahan desa. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif lapangan, yaitu metode analisis data non-statistik yang bertujuan untuk memahami makna, pola, dan fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (7).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Manuba adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Manuba memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang baik untuk bisa dikembangkan, baik itu hasil pertanian, perkebunan, maupun kehutanan. Selain Sumber Daya Alam (SDA) yang baik, Desa Manuba juga memiliki Sumber Daya Manusia

(SDM) yang handal. Hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

Tabel 1. Potensi yang dimiliki Oleh Desa Manuba

No	Bidang	Potensi yang dimiliki
1	Pertanian	➤ Padi
2	Perkebunan	➤ Kacang ➤ Jagung ➤ Bawang Merah
3	Perikanan	➤ Budidaya Ikan Air Tawar
4	Laut/Sungai	➤ Penggalian Pasir ➤ Wisata Alam

Catatan : Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan bagian pemasaran, dan ada sebagian warga yang tidak menjual atau mendistribusikan potensi alam desanya keluar dari desa Manuba

Sumber : Laporan Awal KKN Tematik Desa Manuba Tahun 2022

Dilihat dari sosial budaya, penduduk Desa Manuba 100% beragama islam. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, yang lainnya pedagang, buruh tani, peternak, PNS, TNI atau POLRI, Guru dan Karyawan. Desa Manuba juga memiliki potensi yang sangat baik untuk terus dikembangkan. Di bidang pendidikan sudah berkembang, pendidikan mulai dari PAUD/TK, SD atau MI, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Tabel 2. Laporan Penduduk Perdesun/Lingkungan Desa Manuba Tahun 2022

No	DUSUN	Penduduk awal Bulan ini			Lahir Bulan ini			Mati Bulan ini			Pendatang Bulan ini			Pindah Bulan ini			Penduduk Akhir Bulan ini			Jumlah KK			Jumlah Penduduk Wajib Pajak		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Barantang	294	293	587	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	293	290	583	131	32	163	166	178	344
2	Alakkang	186	168	354	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	187	167	354	84	22	106	138	161	299
3	PallaE	68	63	131	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	64	132	28	8	36	27	4	31
4	Manuba	263	209	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	262	209	471	121	27	148	170	162	332
Jumlah		811	733	1.544	1	1	2	0	0	0	0	1	1	2	5	7	810	730	1.540	364	89	453	501	505	1006

Sumber : Laporan Penduduk Kantor Desa Manuba, 2022

BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Prinsip - prinsip BUMDes yaitu *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel*.

Berkaitan dengan pengertian BUMDes, menurut Bapak Abdul Hapid selaku Kepala Dusun Alakkang, "BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang digunakan untuk membantu dan meringankan para pemilik usaha ataupun pedagang dalam lingkungan masyarakat desa". Menurut Bapak Kamaluddin selaku Kepala Dusun PallaE, "BUMDes merupakan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk masyarakat desa yang memiliki usaha". Menurut Andi Muluki selaku Kepala Dusun Barantang, "BUMDes adalah dana yang diturunkan dari pemerintah untuk rakyat desa yang mempunyai usaha". Menurut Bapak Syaibatul Hamdi selaku Kepala Dusun Manuba, "BUMDes merupakan lembaga yang dapat meringankan pemilik usaha atau pedagang yang ada di lingkungan masyarakat desa".

Adapun tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No.4/2015 adalah meningkatkan perekonomian desa, dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selain itu, juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Berkaitan dengan tujuan utama BUMDes Awal Karya Desa Manuba, menurut Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes Awal Karya Desa Manuba, “BUMDes Awal Karya Desa Manuba ini memiliki tujuan utama, bagaimana agar pembangunan di Desa Manuba ini dapat berjalan efektif dan mendapatkan Penghasilan Asli Desa melalui BUMDes Awal Karya dan adapun tujuan lainnya yaitu bagaimana membuat masyarakat Desa Manuba itu menikmati yang namanya kesejahteraan, mereka dilibatkan untuk berpartisipasi dalam mengelola atau dalam pengembangan BUMDes Awal Karya Desa Manuba kedepannya”.

BUMDes Awal Karya Desa Manuba merupakan suatu lembaga pengelolaan keuangan milik desa yang memiliki 4 (empat) jenis usaha. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes Awal Karya Desa Manuba, “Untuk saat ini jenis usaha yang aktif yaitu pertama, perdagangan eceran pupuk dan pemberantas hama, kedua perdagangan Gas Elpiji, ketiga penyedia jasa pembayaran, dan keempat unit usaha permandian alam”.

Mengenai Pengelolaan Unit Usaha BUMDes Awal Karya Desa Manuba menurut Ibu Hasna Sultan, S.Sy selaku Kepala Desa Manuba, “Alhamdulillah untuk saat ini pengelolaan Unit Usaha BUMDes Awal Karya Desa Manuba ini berjalan dengan lancar dan ada beberapa Unit Kerja yang baru-baru juga di fasilitasi oleh BUMDes Awal Karya Desa Manuba, seperti pengelolaan wisata. Ada 2 wisata di Desa Manuba untuk saat ini BUMDes Awal Karya Desa Manuba yang tangani/kelola”. Menurut Bapak Abdul Hapid selaku Kepala Dusun Alakkang, “Pengelolaan Unit Usaha BUMDes Awal Karya saat ini sudah mulai aktif, apalagi beberapa usaha yang telah diprogram oleh BUMDes yaitu salah satunya pengelolaan wisatanya dan pengelolaan usaha perdagangan pupuk eceran dan pemberantasan hama”.

Tabel 3. Jenis Usaha yang dijalankan oleh BUMDes Awal Karya Desa Manuba

No	Jenis Usaha
1	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
2	Perdagangan Gas Elpiji
3	Penyedia Jasa Pembayaran
4	Permandian Alam

Sumber : Data BUMDes Awal Karya Desa Manuba, 2022

Adapun mengenai kepengurusan BUMDes Awal Karya Desa Manuba, menurut Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes Awal Karya Desa Manuba mengenai kepengurusan BUMDes Awal Karya yaitu, “Pengurus inti itu ada 3 orang yaitu Direktur, Sekretaris, dan Bendahara. Ada juga masuk dalam struktur itu bagian Penasehat dan Pengawas. Untuk Manajernya sendiri kemarin dalam program kerja, saya membentuk 6 Manajer, tapi hanya 4 (empat) Manajer yang aktif, sedangkan setiap Manajer itu memiliki karyawan, dan ada juga yang bekerja sendiri dalam mengelola usaha itu. Untuk Unit Usaha Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama itu, bekerja sama dengan kelompok tani, dan sekarang juga sudah memiliki kios tersendiri dan mempekerjakan 1 (satu) orang. Kemudian, untuk Unit Usaha Permandian Alam memiliki 2 Unit, pertama berada di Dusun Manuba yang memiliki nama Unit Permandian Alam Wae Mabuangnge dan memiliki 10 orang karyawan termasuk Manajernya. Untuk Unit Permandian Alam Makkatoangnge yang berada di Dusun Alakkang yang memiliki 2 orang karyawan termasuk Manajernya”.

Tabel 4. Tata Kelola Organisasi BUMDes

Aktif (Kepengurusan Lengkap)	✓	Tidak Aktif (Kepengurusan Lengkap)	x
Aktif (Kepengurusan Tidak Lengkap)	X	Tidak Aktif (Kepengurusan Tidak Lengkap)	x
Kepengurusan Berjalan Optimal (Ketua dan Pengurus Mampu bekerja sama)		Kepengurusan Tidak Berjalan Optimal (Terdapat Unsur Pengurus yang tidak Aktif)	
Memiliki Unit Usaha	✓	Tidak Memiliki Unit Usaha	x
Unit Usaha Lebih dari 1		Unit Usaha Hanya 1	
1. BRI Link		
2. Pupuk dan Pemberantasan Hama			
3. Wisata Permandian Alam			
4. LPG			
5. Ayam Petelur			

6. Penggalian Pasir

Memiliki Papan Nama BUMDes	✓	Tidak Memiliki Papan Nama BUMDes	x
----------------------------	---	----------------------------------	---

Catatan : Untuk unit usaha gas LPG, pupuk subsidi dan BRI link berjalan baik, namun untuk usaha tempat wisata belum berjalan cukup baik, karna kurangnya sumberdaya manusia yang di butuhkan.

Sumber : Laporan Awal KKN Tematik Desa Manuba Tahun 2022

Berkaitan dengan Sistem Pengelolaan Dana BUMDes Awal Karya Desa Manuba, menurut Bapak Syukur selaku Direktur BUMDes, "Sistem Pengelolaannya masih tergolong sederhana, karena pada awalnya kami masih menggunakan administrasi manual tetapi sekarang ini, kita sudah mulai menggunakan administrasi secara digital, berupa aplikasi dalam mengelola keuangan tersebut." Menurut Ibu Rusmiati selaku Bendahara BUMDes Awal Karya Desa Manuba,

"Sistem Pengelolaan Dana BUMDes pada awalnya masih melakukan administrasi secara manual, tetapi sekarang ini kami sudah mulai perlahan-lahan melakukan administrasi secara digital untuk mengelola Dana BUMDes, karena menurut saya administrasi secara digital ini, menjadi langkah yang efisien dan mempermudah dalam mengelola laporan keuangan BUMDes nantinya."

Berkaitan dengan Dana BUMDes Awal Karya Desa Manuba, menurut Ibu Hasnah Sultan, S.Sy selaku Kepala Desa Manuba, "Kalau mengenai dana BUMDes itu yang saya tahu sekarang yaitu mungkin sudah mencapai senilai 200 juta lebih, karena waktu Kepala Desa yang lalu, beliau sudah mengeluarkan dana sekitar 101 juta, kalau selama saya menjabat sebagai Kepala Desa, saya mengeluarkan dana lebih dari 90 juta, jadi mungkin sudah ada lebih 200 juta di Kas BUMDes".

Menurut Ibu Rusmiati selaku Bendahara BUMDes Awal Karya Desa Manuba, *"mengenai dana BUMDes, pada saat Kepala Desa yang lalu saya telah melaporkan kurang lebih 100 juta yang telah diberikan ke Kas BUMDes, sedangkan pada saat Kepala Desa yang menjabat sekarang ini sekitar kurang lebih 90 juta yang telah diberikan ke Kas BUMDes, dan dana tersebut telah kami pergunakan untuk pembukaan Kios Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama di Pasar Palanro, dan dana tersebut juga telah digunakan untuk pemeliharaan tempat wisata alam yang ada di Desa Manuba. Dana tersebut juga telah digunakan untuk pemeliharaan Kantor BUMDes Awal Karya Desa Manuba yang sempat tidak terurus, dan dana tersebut juga digunakan untuk penggajian karyawan yang bekerja di Kios maupun di tempat Wisata Permandian Alam"*.

Menurut setiap Kepala Dusun di Desa Manuba mengenai Dana BUMDes, semuanya hampir sama, *"mengenai nominal Dana BUMDes yang ada saya kurang tau, yang pasti mengenai Dana BUMDes itu, digunakan untuk Unit Usaha yang ada di BUMDes, seperti Pemeliharaan tempat Wisata Permandian Alam dan Kios Perdagangan yang menjadi alternatif perdagangan bagi masyarakat Desa Manuba terutama di Usaha Pertanian"*.

Berkaitan dengan Pengelolaan Dana BUMDes, menurut Ibu Hasnah Sultan, S.Sy selaku Kepala Desa Manuba, *"Alhamdulillah pengelola BUMDes di Desa Manuba itu dipantau terus oleh masyarakat, karena sebagian memang Dana BUMDes ini diperuntukkan untuk masyarakat, seperti di bidang pertanian dan wisata"*.

Tabel 5.Tata Kelola Keuangan BUMDes

Memiliki Pembukuan Standar	✓	Memiliki Pembukuan Standar Namun tidak Difungsikan	x
Memiliki Pembukuan Standar Namun hanya sebahagian	✓	Tidak Memiliki Pembukuan Standar	x
Penatakelolaan Keuangan telah Memanfaatkan Model Komputerisasi	X	Penatakelolaan Keuangan Masih dilakukan secara Manual	✓
Penatakelolaan Keuangan dilakukan secara Manual dan juga Memanfaatkan Model Komputerisasi	✓		

Catatan : Kondisi tata kelola keuangan BUMdes awal karya cukup baik, karena memiliki pembukuan standar meskipun hanya sebahagian dan penatakelolaan keuangan yang dilakukan secara manual dan juga memanfaatkan model komputerisasi

Sumber : Laporan Awal KKN Tematik Desa Manuba Tahun 2022

Mengenai akses masyarakat dalam mengetahui atau mendapatkan informasi tentang Dana BUMDes, menurut Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes, “terkait aspek yang kami gunakan berupa spanduk, tetapi hanya menginformasikan mengenai Unit Usaha yang kami tangani atau kami bentuk, tetapi mengenai dana yang ada di Kas BUMDes tidak kami informasikan didalam spanduk tersebut. Untuk *Website* BUMDes sendiri, kami memiliki rencana akan menerapkan *website* BUMDes nantinya untuk memperlihatkan kepada masyarakat Desa Manuba, itulah transparansi kami kepada masyarakat Desa Manuba dalam mengelola Dana BUMDes”.

Berdasarkan pernyataan Ibu Hasnah Sultan, S.Sy selaku Kepala Desa Manuba menyatakan bahwa sekarang ini sudah ada sosialisasi dari pengurus BUMDes Awal Karya, tetapi sosialisasi tersebut biasanya hanya dihadiri oleh Staff BUMDes, Staff Pemerintah Desa termasuk Kepala Desa, dan setiap Kepala Dusun yang ada di Desa Manuba, sedangkan sosialisasi kepada setiap kalangan/golongan masyarakat Desa Manuba, belum ada, hanya sebatas spanduk saja pemberian informasinya kepada masyarakat. Ibu Rusmiati selaku Bendahara BUMDes Awal Karya juga menyatakan bahwa selama ini sosialisasi kepada masyarakat dari BUMDes belum ada, hanya sosialisasi di Kantor Desa saja, dan hanya dihadiri setiap Kepala Dusun sebagai perwakilan masyarakat. Bapak Kamauddin, Abdul Hafid, Andi Muluki dan Syaibatul Hamdi selaku Kepala Dusun di Desa Manuba juga mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes kepada masyarakat, hanya saja perwakilan masyarakat di wakili oleh setiap Kepala Dusun, maka dari itu BUMDes mengharapkan setiap Kepala Dusun sebagai penerus informasi dari BUMDes kepada masyarakat.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk Transparansi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awal Karya Desa Manuba, menurut Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes, “Saat ini hanya sebatas penyampaian kegiatan dan laporan keuangan pada saat musyawarah desa, dan pada saat musyawarah desa tersebut diwakili hampir semua perwakilan Kepala Dusun”.

Mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awal Karya Desa Manuba, menurut Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes, “*Terkait Transparansi kita sudah menerapkannya dan setiap kegiatan kami laporkan di setiap musyawarah desa dan laporan keuangannya kami jelaskan pada saat pembacaan laporan pertanggungjawaban*”.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Syukur selaku Direktur BUMDes, hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu Hasnah Sultan, S.Sy selaku Kepala Desa Manuba, “Iya, BUMDes Awal Karya Desa Manuba selalu melaksanakan sosialisasi, seperti apabila terdapat hal-hal yang ingin dilaksanakan oleh BUMDes Awal Karya Desa Manuba, pastinya di sosialisasikan di Pemerintah Desa dan di masyarakat perwakilan, terutama apabila terdapat laporan pertanggungjawaban tiap akhir tahun, pastinya BUMDes Awal Karya Desa Manuba melaksanakan tugasnya bersama Pemerintah Desa”.

Pembahasan

1. *Good Corporate Governance*

Dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu mekanisme pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis atau produktif guna mencapai tujuan organisasi.

Istilah *Governance* dan *Government* mempunyai makna yang berbeda. Karena *Government* lebih tertutup dan sukarela, sektor swasta tidak dapat berpartisipasi dalam struktur organisasinya. Sementara *governance* yang lebih bersifat terbuka dalam struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. Tata kelola melibatkan semua aktor publik dan swasta dalam menciptakan struktur sehingga mereka dapat memprioritaskan kebijakan berdasarkan kebutuhan fungsional mereka. Jika dilihat dari perspektif konvensi interaksi, tata kelola menunjukkan sifat konsultasi yang bersifat horizontal dan pola hubungan kerja sama konsultasi, sehingga meningkatkan keterbukaan. Tata kelola melibatkan partisipasi aktor serta aturan dan prosedur permainan yang memastikan pemerintah berfungsi secara efektif (8).

Kata Kunci dari *Governance* adalah bahwa negara tidak bisa berdiri sendiri dalam mengurus kekuasaan dan sumber daya yang ada. Dibutuhkan pelibatan aktor-aktor lain secara sejajar dan proporsional (8).

Dengan mengawasi atau memantau kinerja pengelolaan dan memastikan akuntabilitas pengelolaan atas pengelolaan dana desa sesuai dengan kerangka peraturan, konsep *good governance* bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa (9).

Penerimaan akan pentingnya seperangkat aturan atau tata kelola yang mengatur hubungan baik, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam bisnis dan pelayanan publik dikenal dengan tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (10).

Dimulai dengan definisi *Good Corporate Governance*, perlu untuk memberikan informasi terkait dan menggambarkan kinerja sektor publik, yang sangat penting untuk meminta pertanggungjawaban semua pemangku kepentingan atas semua kegiatan (10).

Untuk mencapai pengelolaan desa yang lebih transparan dan melayani semua kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa, diusulkan gagasan *Good Governance*. Diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat dan gagasan ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi peningkatan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa (9). Secara umum terdapat lima Konsep dasar dari *Good Corporate Governance* yaitu:

- 1) *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan kemampuan, rancangan, kerangka kerja dan kewajiban organ organisasi sehingga penyelenggaraan organisasi berhasil diselesaikan.
- 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) antara manajemen perusahaan dengan prinsip-prinsip pedoman korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana usaha dijalankan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh atau tekanan dari manajemen yang bertentangan dengan prinsip korporasi yang sehat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memuaskan hak istimewa mitra yang muncul dalam pandangan pengaturan dan peraturan serta pedoman yang relevan.

Hanya satu aspek transparansi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu transparansi/keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyebaran informasi perusahaan yang penting dan relevan.

2. Pengelolaan Keuangan

Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi (11). Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada tiga prinsip utama (7)

- a. Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Karena proses penganggaran menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka transparansi dalam konteks ini berarti anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap informasi mengenai proses tersebut (8).
- b. Kedua, prinsip akuntabilitas. Proses penganggaran mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaannya harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui tentang anggaran dan menuntut pertanggungjawaban atas penyusunan atau pelaksanaannya (8).
- c. Ketiga, prinsip *value for money*. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah tiga prinsip panduan dari prinsip ini dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Istilah "efisiensi" mengacu pada seberapa efektif dana publik dapat digunakan untuk mencapai hasil maksimal. Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik (8).

3. Transparansi

Pada prinsipnya, transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator, yang pertama mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, kedua mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik, dan yang ketiga yaitu mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi terhadap penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (12).

Publik memiliki hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayainya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik.

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (7) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi:

a. Informatif (*Informative*). *Stakeholders* yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat disediakan berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, dan fakta.

1) Tepat Waktu

Untuk menggunakan laporan keuangan sebagai dasar keputusan ekonomi, sosial, dan politik dan untuk menghindari keterlambatan dalam keputusan tersebut, laporan tersebut harus disajikan tepat waktu.

2) Memadai

Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, laporan keuangan di Indonesia harus mencakup pengungkapan yang cukup informatif mengenai faktor-faktor signifikan.

3) Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Akurasi Informasi tidak boleh tidak akurat atau menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan menggunakannya.

4) Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan dari berbagai lembaga harus dapat dibandingkan sepanjang periode waktu.

5) Mudah Diakses Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

b. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik menekankan bahwa setiap informasi publik harus terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dan memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data di badan publik.

c. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan kepada publik atau kelompok pemangku kepentingan.

1) Kondisi Keuangan

pandangan komprehensif atau keadaan keuangan organisasi atau kelompok selama periode waktu tertentu.

2) Susunan Pengurus

Pembagian kerja dan perbedaan fungsi atau aktivitas ditunjukkan oleh struktur organisasi.

3) Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan

Penerapan prinsip *check and balances* (antara lembaga eksekutif dan legislatif) dan tersedianya informasi kepada publik yang memungkinkan mereka mengakses setiap aspek kebijakan pemerintah, merupakan tiga contoh transparansi. Indikator transparansi ada 4 yaitu Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Selain masalah keuangan, lima aspek transparansi perencanaan pemerintahan berikut termasuk dalam prinsip transparansi :

a. Terbuka

Rapat harus terbuka dan memungkinkan orang untuk menyuarakan pendapat mereka. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mudah terlibat dalam perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran keuangan desa.

b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas

Informasi terkait dokumen yang harus diungkapkan kepada publik. Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan data seluas mungkin yang sederhana dan sederhana untuk semua lapisan masyarakat dari pemerintah kota, terlepas dari status sosial dan keuangan sehubungan dengan keadaan keuangan kota.

c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat

Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana). Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

d. Pengungkapan fakta hukum yang dimuat dalam register (seperti buku tanah dan catatan sipil).

Kejelasan dan kelengkapan informasi merupakan salah satu aspek transparansi. Informasi dalam pengertian umum sebagai suatu sumber daya pengetahuan dan kemampuan yang digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial. Substansi hal tersebut mengartikan bahwa informasi memiliki fungsi yang sangat luas mencakup berbagai bidang kehidupan. Dalam relalisasinya baik ekonomi, sosial, bahkan politik, ketiadaan informasi akan membuat seseorang lemah dalam pengambilan keputusan. Transparansi juga terkait dengan aksesibilitas dan keterbukaan.

e. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa

Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Gagasan atau tujuan masyarakat harus dipertimbangkan oleh pemerintah desa sebelum keputusan desa diambil.

Ada 3 (tiga) indikator dari Transparansi, indikator pertama dari transparansi yang dapat digunakan adalah tingkat keterbukaan disini, yang mencakup keseluruhan proses pelayanan publik, termasuk persyaratan, biaya, waktu, dan cara pelayanan. Indikator yang kedua dari transparansi menunjuk kepada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan yang dapat dipahami oleh pengguna. Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik merupakan indikator transparansi yang ketiga. Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. pengungkapan prosedur dan biaya yang transparan.
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyiapkan atau menyusun cara untuk mengadu apabila terdapat pelanggaran.

Transparansi memiliki beberapa indikator yang dapat diukur :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen artinya dokumen dapat dengan mudah diperoleh setiap orang yang datang untuk mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung.
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah penyediaan informasi yang mudah dipahami tentang prosedur, biaya dan program yang dapat di akses secara mudah dan langsung.
- c. Keterbukaan proses, khususnya ketersediaan publikasi bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang proses kegiatan.
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi adalah penyedia layanan melakukan sesuai prosedur pelaksanaan

Indikator transparansi terdiri dari beberapa diantaranya, (1) Proses anggaran, khususnya, transparansi dalam kerangka kerja., (2) Setiap pengumuman kebijakan anggaran, (3) Ada dokumentasi yang baik untuk anggaran yang mencakup beberapa indikator keuangan, (4) pengungkapan informasi pengeluaran aktual, (5) Adanya keterbukaan data selama proses kesiapan rencana pengeluaran, (6) Masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses penganggaran. Menurut Forum Kemanusiaan Indonesia, ada enam (6) prinsip transparansi :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
- b. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.

- c. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumber daya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
- d. BUMDes menerbitkan laporan tahunan yang disertai dengan dokumen atau bukti pendukung dan merinci keuangan BUMDes serta kegiatan yang dilakukannya.
- e. Adanya *Website* atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa
- f. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

Berikut adalah indikator transparansi (6):

- a. Apakah ada kerangka hukum yang transparan
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
- c. Adanya audit yang independen dan efektif
- d. Adanya keterlibatan masyarakat.

Untuk mengukur secara akurat sejauh mana prinsip transparansi telah diterapkan dalam praktik pelayanan publik, transparansi atau keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan indikator tertentu. Penerapan prinsip transparansi dapat dikatakan baik dan dapat mengarah pada pemerintahan yang transparan atau tata kelola yang baik apabila indikator-indikatornya terpenuhi.

Berdasarkan dari setiap point pada pembahasan diatas, peneliti dapat mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* dan Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh terhadap Prinsip Transparansi. Karena Transparansi merupakan salah satu Prinsip dari *Good Corporate Governance*. Dan dalam Laporan Keuangan merupakan hasil dari Transparansi, serta dalam proses penyusunan laporan keuangan, harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi.

Adapun dari Hasil Penelitian diatas, peneliti dapat mengatakan bahwa pemahaman setiap Kepala Dusun di Desa Manuba mengenai Pengertian BUMDes sudah cukup baik dan menyatakan bahwa BUMDes merupakan usaha milik desa yang membantu dan meringankan masyarakat yang memiliki usaha, akan tetapi masyarakat juga harus memahami bahwa selain untuk pelayanan sosial, BUMDes juga sebagai lembaga komersial yang juga bertujuan mencari keuntungan dari jenis usaha jasa yang ditawarkan, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kontribusi BUMDes dalam pelayanan sosial dan komersial. Dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, BUMDes melayani kepentingan sosial dan komersial.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, maka peneliti dapat mengatakan bahwa Sistem Pengelolaan Dana BUMDes Awak Karya Desa Manuba ini masih sangat sederhana, karena hanya menggunakan administrasi secara manual, maka dari itu BUMDes Awal Karya Desa Manuba ini sudah mulai belajar menggunakan aplikasi dalam proses pengelolaan keuangannya untuk lebih memudahkan.

Peneliti dapat mengatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes Awal Karya Desa Manuba masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes Awal Karya, pengelolaan keuangan masih sebatas pencatatan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarkan melalui lisan. Padahal berdasarkan teori, transparansi (keterbukaan informasi), merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Akan tetapi keterbukaan ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh BUMDes Awal Karya.

Akses yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi BUMDes Awal Karya berupa website selama ini belum ada, sedangkan pemberian informasi melalui spanduk sudah ada, tetapi hanya informasi mengenai Unit Usaha apa yang sedang BUMDes jalankan, belum terdapat dana BUMDes yang tercantum dalam spanduk tersebut. Informasi hanya disebarkan melalui lisan dan kemudian masyarakat Desa Manuba sendiri yang datang dan mencari informasi lebih lanjut di kantor BUMDes Awal Karya. Kemudahan mengakses berbagai informasi desadapat diakses oleh masyarakat, melalui lisan disetiap perwakilan Kepala Dusun.

Berkaitan dengan kejelasan informasi dan kelengkapan informasi berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa Desa Manuba dan BUMDes Awal Karya seoptimal mungkin memberikan berbagai pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan termasuk dengan memberikan informasi yang holistik. Berbagai kelengkapan dokumen

desa seperti laporan keuangan, data penduduk dan Profil Desa dapat dengan lengkap diperoleh masyarakat. Dengan terpenuhinya keterbukaan informasi terhadap publik artinya mendukung berjalannya peyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam penelitian ini, BUMDes Awal Karya Desa Manuba juga masih belum menerapkan salah satu indikator transparansi ini. Karena dalam musyawarah/sosialisasi desa, masih belum melibatkan masyarakat. Karena yang hadir hanya perwakilan setiap Kepala Dusun. Jadi yang dapat memberikan ide hanya yang hadir pada musyawarah itu juga.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara diatas, maka menurut peneliti, BUMDes Awal Karya Desa Manuba telah menerapkan prinsip transparansi dalam memberikan informasi dana yang ada di BUMDes Awal Karya Desa Manuba, tetapi masih belum maksimal dan harus ditingkatkan dalam proses pemberian informasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, Kepala Desa dan setiap Kepala Dusun/Perwakilan yang telah peneliti wawancarai, mengetahui informasi dana yang ada di BUMDes Awal Karya.

Sesuai gagasan bahwa menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik adalah pengertian dari transparansi itu sendiri. Oleh karena itu, BUMDes Awal Karya Desa Manuba ingin membuat Website untuk memberikan informasi mengenai BUMDes Awal Karya Desa Manuba dan memberikan informasi mengenai dana yang berada di BUMDes kepada setiap kalangan/golongan masyarakat yang ada di BUMDes Awal Karya Desa Manuba.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awal Karya Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance* telah dijalankan, namun belum dilakukan secara maksimal. Meskipun ada upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun masih terdapat keterbatasan dalam akses dan penyebarluasan informasi. Informasi mengenai pengelolaan keuangan BUMDes hanya disampaikan secara lisan dalam musyawarah desa, tanpa adanya dokumentasi atau media khusus yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka dan berkelanjutan. Selain itu, proses pengelolaan keuangan masih terbatas pada pencatatan dan pelaporan sederhana.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar BUMDes Awal Karya Desa Manuba meningkatkan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat melalui media tertulis seperti papan informasi desa, laporan keuangan tahunan yang dibagikan secara terbuka, maupun melalui pemanfaatan media digital yang mudah diakses oleh warga. Selain itu, perlu adanya penguatan kapasitas pengelola BUMDes terkait prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam konteks tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada lembaga ekonomi desa seperti BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fajarudin, M. (2021). *Transparansi Keuangan dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 45–53.
- [2] Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [3] Bodnar, G.H., & Hopwood, W.S. (2003). *Accounting Information Systems*. 9th ed. New Jersey: Prentice Hall.
- [4] Latifah, R., & Sabeni, A. (2017). Pengaruh Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 65–78.
- [5] Ariani, Y., & Nugroho, R. (2019). Efektivitas Pelatihan dalam Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Keuangan Daerah*, 4(3), 120–128.

- [6] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [8] Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- [9] Ekonomi, J., dan Bisnis, K., & Sang Bumi Ruwa Jurai, U. (2021). *EKOMBIS Sains ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Yudastio*. 6, 77–88.
- [10] Salsa Nabila, P., & Ramadani Silalahi, P. (2022). Optimalisasi Good Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Ke Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 148–156.
- [11] Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- [12] Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- [13] Bare, Y. A., Mangindaan, J. V., & Puniindoong, A. Y. (2021). Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes di Desa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara. *Productivity*, 2(3), 208–212. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/productivity/article/view/34578/32459>
- [14] Rahmatullah, R., Tarawiru, Y., & Harun, H. (2024). TINGKAT LITERASI KEUANGAN PENGELOLA BUMDES DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA BUMDES DESA ROSOAN KABUPATEN ENREKANG. *Journal AK-99*, 4(2), 514-527.
- [15] Kurnia, T., Nuryadin, R., & Harun, H. (2024). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL TERHADAP KINERJA PELAYANAN APARAT PADA KANTOR DESA MANUBA KABUPATEN BARRU. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 98-111.